



**KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA**

**PENGUMUMAN
PANITIA SELEKSI CALON ANGGOTA DEWAN PENGAWAS LEMBAGA
PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA
PERIODE 2021-2026
NOMOR 01/PANSEL.DEWAS-RRI/09/2020
TENTANG
SELEKSI CALON ANGGOTA DEWAN PENGAWAS LEMBAGA PENYIARAN
PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA**

Kami mengundang para profesional yang ingin mengabdikan pada bangsa dan negara dan telah memenuhi syarat untuk mendaftarkan diri melalui seleksi terbuka dalam rangka pengisian Jabatan Calon Anggota Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia dan ketentuan perundang-undangan yang terkait, dengan ketentuan sebagai berikut:

I. KETENTUAN UMUM

A. Jabatan yang akan diisi:

Nama Jabatan	Jumlah	Syarat Pendaftar
Dewan Pengawas LPP RRI	5 (lima) orang	Terlampir

B. Persyaratan

1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. Setia pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Sehat jasmani dan rohani;
4. Berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela;
5. Berpendidikan minimal sarjana Strata 1 (S1) atau memiliki kompetensi intelektual yang setara;
6. Berusia minimal 30 (tiga puluh) tahun pada saat mendaftar;
7. Mempunyai integritas dan dedikasi tinggi untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara;

8. Memiliki kepedulian, wawasan, pengetahuan dan/atau keahlian, serta pengalaman di bidang penyiaran publik;
9. Memiliki visi dan misi pengembangan LPP RRI sesuai perkembangan transformasi digital;
10. Memiliki kemampuan dan pengalaman dalam organisasi sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun;
11. Tidak terkait langsung ataupun tidak langsung dengan kepemilikan dan kepengurusan media massa lainnya;
12. Bersedia melepaskan jabatan yang dapat menimbulkan konflik kepentingan apabila terpilih sebagai anggota Dewas RRI; dan
13. Tidak menjadi anggota ataupun pengurus partai politik.

II. TATA CARA PENDAFTARAN DAN KELENGKAPAN DOKUMEN LAMARAN

1. Pendaftaran dilaksanakan mulai **tanggal 1 Oktober 2020 s.d. 12 Oktober 2020** melalui Laman seleksi-dewas-rri.kominfo.go.id
2. Format berkas pendaftaran dapat diunduh melalui Laman Kementerian Komunikasi dan Informatika di seleksi-dewas-rri.kominfo.go.id
3. Berkas yang kurang lengkap atau tidak lengkap sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan dianggap **gugur**;
4. Seluruh dokumen persyaratan administrasi diunggah **paling lambat 12 Oktober 2020 pukul 23:59 WIB** melalui laman seleksi-dewas-rri.kominfo.go.id dengan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. Surat permohonan pendaftaran yang ditandatangani dan Daftar Riwayat Hidup (DRH) sesuai dengan template yang disediakan dan dengan format PDF (lampiran 1);
 - b. Hasil scan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan format PDF/JPG/JPEG ;
 - c. Hasil scan ijazah asli terakhir dengan format PDF/JPG/JPEG;
 - d. Pas Foto berwarna terbaru dengan format file JPG/JPEG;
 - e. Surat Keterangan Sehat yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Pemerintah atau Puskesmas dengan format PDF/JPG/JPEG;
 - f. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang masih berlaku dengan format PDF/JPG/JPEG;
 - g. Surat Pernyataan kesediaan menjadi Anggota Dewan Pengawas LPP RRI yang ditandatangani oleh yang bersangkutan di atas materai Rp6.000,- dengan format PDF (lampiran 2);
 - h. Surat Pernyataan kesediaan melepaskan jabatan, kepemilikan, dan kepengurusan pada media massa dan/atau organisasi lain yang

ditandatangani yang bersangkutan di atas materai Rp 6.000 dengan format PDF (lampiran 3);

- i. Surat pernyataan kesediaan bekerja penuh waktu yang ditandatangani di atas materai Rp 6.000,- dengan format PDF (lampiran 4);
- j. Surat Pernyataan tidak menjadi anggota partai politik, yang ditandatangani yang bersangkutan di atas materai Rp 6.000,- sesuai formulir dengan format PDF (lampiran 5);
- k. Surat Pernyataan akan menerima semua putusan Panitia Seleksi dan tidak akan menggugat baik hukum maupun non hukum, yang ditandatangani yang bersangkutan di atas materai Rp 6.000,- sesuai formulir dengan format PDF (lampiran 6);
- l. Surat Pernyataan bersedia mengundurkan diri apabila di kemudian hari ditemukan dokumen yang disampaikan terbukti tidak benar, yang ditandatangani di atas materai Rp.6.000,- dengan format PDF (Lampiran 7);
- m. Pakta Integritas yang menyatakan kesetiaan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta memiliki integritas dan dedikasi untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa, jika terpilih sebagai Anggota Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia periode 2021-2026 yang ditandatangani oleh yang bersangkutan di atas materai Rp6.000,- dengan format PDF (lampiran 8);
- n. Menyampaikan bukti tanda lapor LHKPN bagi wajib LHKPN dengan format PDF/JPG/JPEG; dan
- o. Menyampaikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dengan format PDF/JPG/JPEG.

III.KETENTUAN LAIN

1. Pelamar tidak diperkenankan berkomunikasi secara langsung maupun tidak langsung dengan Panitia/Sekretariat Seleksi Calon Dewan Pengawas LPP RRI selama proses seleksi;
2. Berkas administrasi pelamar yang diproses untuk mengikuti tahap seleksi berikutnya adalah berkas yang lengkap sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan;
3. Proses dan tahapan seleksi ini ***TIDAK DIKENAKAN BIAYA ATAU PUNGUTAN DALAM BENTUK APAPUN***;
4. Setiap perkembangan informasi seleksi ini akan disampaikan melalui surat elektronik (*e-mail*) dan laman (*website*) Kementerian Komunikasi dan Informatika

di kominfo.go.id dan seleksi-dewas-rri.kominfo.go.id. ***Kelalaian tidak mengikuti perkembangan informasi menjadi tanggung jawab pelamar;***

5. Seluruh biaya akomodasi, transportasi, kelengkapan administrasi, dan biaya pribadi yang dikeluarkan oleh pelamar selama melaksanakan proses seleksi ditanggung oleh pelamar;
6. Pelamar yang memberikan keterangan/data dengan tidak benar, maka keikutsertaan/kelulusan sebagai peserta/pelamar dapat digugurkan secara sepihak oleh Panitia; dan
7. Keputusan Panitia Seleksi Calon Dewan Pengawas LPP RRI 2021-2026 bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat sesuai ketentuan perundang-undangan.

Jakarta, 28 September 2020

Ketua Panitia,



Ahmad M. Ramli